
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Jalan. APT. Pranoto 3 Tanjung Redeb – Berau

2018

DAFTAR ISI

Cover Laporan

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2

BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8

2.1. Program, Kegiatan, dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017.....	8
2.2. Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021	10
2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017	12
2.4. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021	12
2.5. Permasalahn dan Solusi	12

BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantu

14

BAB IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

15

4.1. Kerjasama Antar Daerah (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan BPPT Pusat)	15
a. Kebijakan dan Kegiatan	15
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	15
c. Permasalahn dan Solusi	16

BAB V Penghargaan

19

BAB VI Penutup

20

6.1. Kesimpulan	20
6.2. Saran	20

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu pada Bidang komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai Organisasi Perangkat (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Berau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan.

Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Berau 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

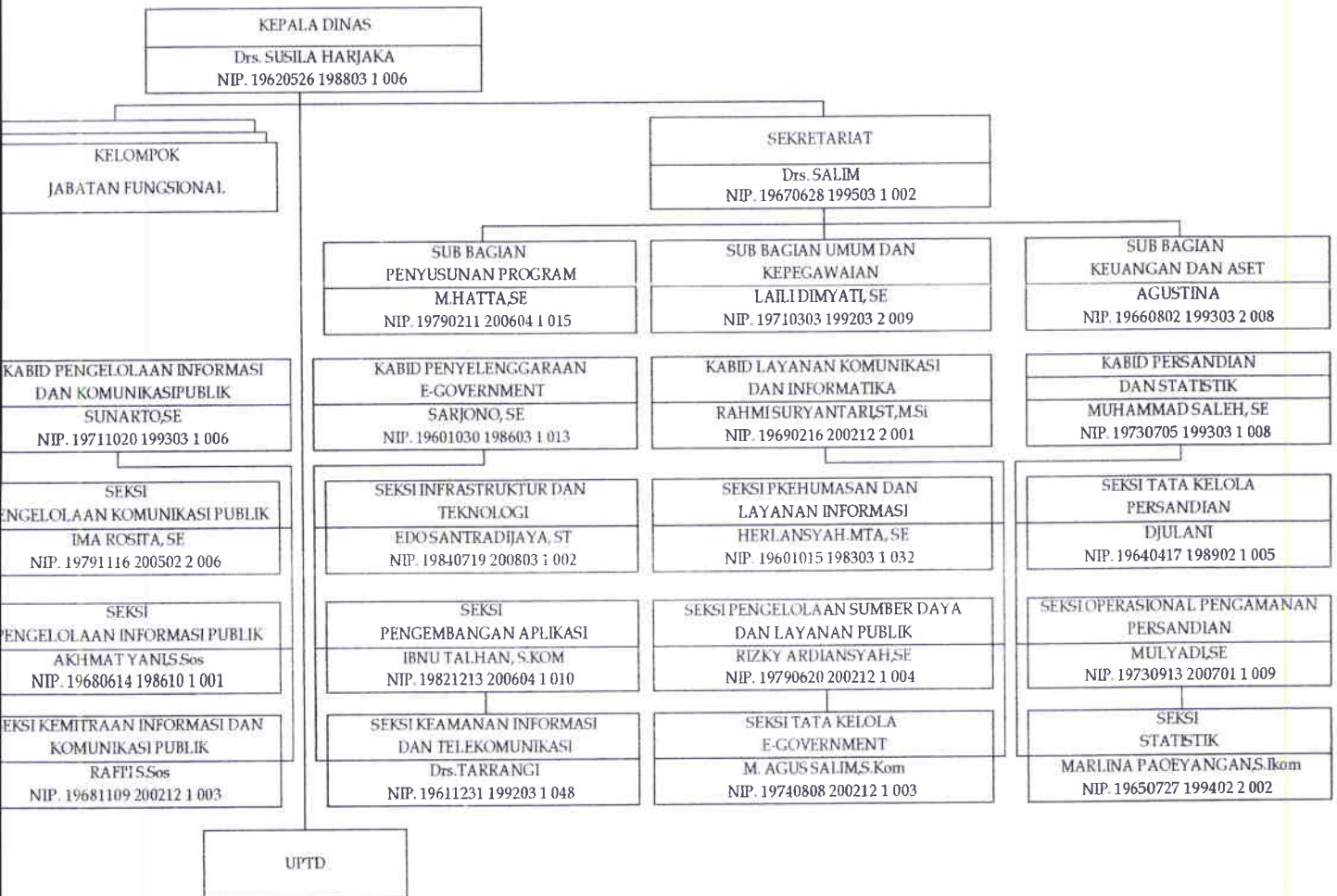
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Adapun nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Urusan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan Urusan Statistik Sektoral, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
5. Berikut ini disajikan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2017 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Berau.

6. Aparatur sipil negara yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 39 orang yang dapat digambarkan dalam Daftar Urut Kepegawaian (DUK) per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

DEPARTEMEN / LEMBAGA / DAERAH / TINGKAT
KABUPATEN BERAU

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Unit Organisasi

: Dinas Komunikasi Dan Informatika

Bulan

30 Desember

2017

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA BKN
NOMOR : 03/SE/1980 TANGGAL 11 FEBRUARI 1980

No	N A M A	N I P	T M T	PANGKAT		NAMA	TMT	ESE	MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TGL LHR	USIA	DATA LAIN-LAIN			
				Gol Ruang	TMT				Bulan	Nama	Bulan dan Jam Tahun	Nama	Jurusan	Lulus Tahun	Gelar			Tk. Jazah	TMP LAHIR	LP	AGAMA
1	Drs. SUSILA HARJAKA	9620526 98803 1008	01-03-988	IV/c	01-04-2014	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	04-01-2017	II B	29	6	DIKLAT PIM TK 2016	SARJANA	POUEKOP	1986	Drs	S 1	26-05-982	56	SLEMAN	L	ISLAM
2	Drs. SALIM	9670628 99503 1002	01-03-995	IV/b	01-01-2014	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	04-01-2017	III A	22	6	DIKLAT PIM TK 2016	SARJANA	SOSPOL SOSIA TRI	1992	Drs	S 1	28-06-967	51	BERAU	L	ISLAM
3	SARJONO, SE	9660030 98603 1010	01-03-986	IV/a	01-04-2016	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	04-01-2017	III B	31	6	DIKLAT PIM TK 2016	SARJANA	MANAJEMEN	1997	SE	S 1	30-10-960	56	SRAGEN	L	ISLAM
4	RAHMI SURYANTARI, ST. M.	969026 2002 2 2002	01-04-2002	IV/a	01-01-2016	KEPALA BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	03-01-2017	III B	14	9	DIKLAT PIM TK 2017	PASKA SARJANA	MAGISTER ILMU EKONOMI	2013	SE. MS	S 2	16-02-969	49	PATI	P	ISLAM
5	HERLIANSYAH, MTA, SE	9660005 98303 1032	01-03-983	III/d	01-01-2005	KASIKHEUMASAN DAN LAYANAN INFORMASI	05-10-2017	IV A	34	6	DIKLAT PIM TK 2009	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S 1	15-10-960	56	PANJUNG REDE	L	ISLAM
6	Drs. TARRANGI	9611231 99203 1048	01-03-992	III/d	01-04-2006	KASIKHEUMASAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	05-10-2017	IV A	25	6	DIKLAT PIM IV 2003	SARJANA	SOSPOL	1987	Drs	S 1	31-12-961	57	APIENREKAN	L	ISLAM
7	SUNARTO, SE	9711020 99203 1006	01-03-993	III/d	01-04-2011	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK	05-10-2017	III B	24	6	DIKLAT PIM TK 2011	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2000	SE	S 1	20-10-971	47	BERAU	L	ISLAM
8	MUHAMMAD SALEH SE	9730705 99303 1008	01-03-993	III/d	01-01-2012	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	04-01-2017	III B	24	6	DIKLAT PIM TK 2004	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S 1	05-07-973	45	PANJUNG REDE	L	ISLAM

9	AKHMAT YANI, S.Sos	9680614 9860 1001 01-D-986	III/d	01-10-2012	KEPALA SEKSI PENGELOLAN INFORMASI PUBLIK	12-01-2017	IV/A	31	10	DIKLAT PIM IV	2003	285	SARJANA	MANAGEMENT PEMBANGUNAN DAERAH	2000	S50s	S1	14-6-988	50	ANJUNG REDE	L	ISLAM
10	DIJULANI	9640417 98902 10050102-989	III/d	01-04-2014	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	04-01-2017	IV/A	28	7	DIKLATADUM	988		STM	MESIN	985			17-4-964	54	JM BERPUJUN	L	ISLAM
11	AGUSTINA	9660802 98903 2 000103-893	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	12-01-2017	IV/A	24	6	DIKLATADUM	989	250	DIPLOMA 3	MANAGEMENT PERPAJAKAN	988		D3	08/02/966	52	TIKALA	P	PROTESTAN
12	H LALI DIMYATI, SE	9710303 98203 2 00050103-892	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN	05-10-2017	IV/A	25	6	DIKLAT PIM TK	2013	285	SARJANA	MANAGEMENT	2001	SE	S1	3-3-971	47	SAMBALUNG	P	ISLAM
13	M. AGUS SALIM, S.Kom	9740808 2002 2 100301-2-2002	III/d	01-10-2015	KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	12-01-2017	IV/A	14	10	DIKLAT PIM TK	2012	285	SARJANA	TEKNIK INFORMATIKA	2000	Sko m	S1	8-8-974	44	BERAU	L	ISLAM
14	RIZKY ARDANSYAH, SE	9790620 2002 2 100401-2-2002	III/d	01-10-2015	KEPALA SEKSI PENGELOLAN SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK	05-10-2017	IV/A	14	9	DIKLAT PIM TK	DES 2012	285	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S1	20-06-979	39	BERAU	L	ISLAM
15	RAFIL, S.Sos	9681109 2002 2 1003 01-2-2002	III/d	01-10-2015	KEPALA SEKSI KEMITRAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	12-01-2017	IV/A	14	10	DIKLAT PIM TK	2014		SARJANA	JURNALISTIK	995	SSo s	S1	9-11-968	50	BERAU	L	ISLAM
16	MA ROSITA, SE	9791116 200502 2 00090102-2005	III/c	01-10-2013	KEPALA SEKSI PENGELOLAN KOMUNIKASI PUBLIK	12-01-2017	IV/A	12	7	DIKLAT PIM TK	2014		SARJANA	AKUNTANSI	2002	SE	S1	6-11-979	39	SAMARINDA	P	ISLAM
17	MARLINA PAOEYANGAN, S	9650727 99402 2 00101-02-994	III/c	01-10-2014	KEPALA SEKSI STATISTIK	05-10-2017	IV/A	23	7				SARJANA	LMU KOMUNIKASI	2006	Siko m	S1	27-07-965	53	BALIKPAPAN	P	PROTESTAN

18	IBNU TALHAH, S Kom	19821213 200604 1010104-2006	0104-2006	III/c	0104-2014	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	2-01-2017	IV/A	8	5	DIKLAT PIM TK	2015	240	SARJANA	TEKNIK KOMPUTER	Sko m	S 1	13-12-1982	36	SURABAYA	L	ISLAM
19	MULYADI, SE	19730913 20070110090104-2007	0104-2015	III/c	0104-2015	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMATAN PERSANDIAN	05-10-2017	IV/A	10	8			216	SARJANA	EKONOMI PENGEMBANGAN	SE	S 1	13-09-1973	45	PUNJUNG TABU	L	ISLAM
20	EDO SANTRADJAYA, ST	19840719 200803 10103-2008 002	10-04-2016	III/c	10-04-2016	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	05-10-2017	IV/A	9	6				SARJANA	TEKNIK INFORMATIKA	ST	S 1	19-07-1984	34	SAMARINDA	L	ISLAM
21	IRWAN SAPUTRA, S KOM	19821220 200904 10030104-2009	0104-2013	III/b	0104-2013	PELAKSANA			8	5	DIKLAT PRAJAJA		135	SARJANA	KOMPUTER	SEKOM	S 1	20-12-1982	36	BERAU	L	ISLAM
22	M. HATTA SE, MM	19790211 200604 1010104-2006	0104-2014	III/b	0104-2014	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	05-10-2017	IV/A	11	5				PASCA SARJANA	MAGISTER MANAJEMEN	SE. MM	S 2	14-02-1979	39	BERAU	L	ISLAM
23	MARGIONO, SE	1980108 2007011007 0104-2007	01-10-2014	III/a	01-10-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJAJA	AGUS TUS 2008	174	SARJANA	EKONOMI PENGEMBANGAN	SE	S 1	08-11-1980	38	BATTANG	L	ISLAM
24	SUSILOWATI, SE	19740312 2007012 0210101-2007	0104-2014	III/a	0104-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJAJA	NOP 2010	174	SARJANA	EKONOMI PENGEMBANGAN	SE	S 1	12-03-1974	44	BERAU	P	ISLAM
25	AGRIRANTO	19600117 198803 10050103-1988	01-10-2016	III/a	01-10-2016	PELAKSANA			29	6				SMA				17-01-1960	58	PANJUNG REDE	L	ISLAM
26	SYARIFUDDIN NUR, A MD	19770621 2008011010101-2008	0104-2016	III/a	0104-2016	PELAKSANA			9	8	DIKLAT PRAJAJA II			DIPLO MA 2				21-06-1977	41	BERAU	L	ISLAM
27	FARIZ DANAN SYAH SAPUTRO, S STP	19940223 201609 110010109-2016	01-10-2017	III/a	01-10-2017	PELAKSANA			1	10	DIKLAT PRAJAJA	2017		SARJANA	Politik Pemerintahan	SST P	D 4	23-02-1994	24	KUDUS	L	ISLAM
28	EDMAN HELDY	19731023 199803 100410103-1998	0104-2010	III/d	0104-2010	PELAKSANA			8	6	DIKLAT PRAJAJA	JUNI 1998		SMA				23-10-1973	45	BERAU	L	ISLAM
29	ABDUL WAHAB SYAKHRANI	19680327 2007011010101-2007	0104-2014	III/c	0104-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJAJA	AGS 2008	174	SMA				27-03-1968	50	PANJARAN MASIH	L	ISLAM

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Program dan kegiatan untuk tahun 2017 dapat digambarkan pada table halamanberikut :

Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Thn. 2017

No	Program dan Kegiatan	Aggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp 1.500.000
	b Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Rp 73.700.000
	c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 69.000.000
	d Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Rp 120.831.000
	e Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Rp 37.300.000
	f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 10.000.000
	g Penyediaan alat tulis kantor	Rp 29.203.200
	h Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.000.000
	i Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 5.000.000
	j Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 45.000.000
	k Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 5.000.000
	l Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 7.000.000
	m Penyediaan makanan dan minuman	Rp 25.000.000
	n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 175.500.000
o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 30.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Paratur	
	a. Pemeliharaan peralatan dan jaringan	Rp 155.667.000
3	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	
	a Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi	Rp 245.000.000
	b Penyediaan dan Pengelolaan internet	Rp 447.145.000
	c Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Rp 210.000.000
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	
	a Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Rp 385.692.000
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
	a Peningkatan Infrastruktur jaringan telematika	Rp 109.076.000

2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sehingga dapat mengetahui apakah suatu tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu berhasil atau tidak. Dalam hal ini setiap tahun dilakukan evaluasi oleh inspektorat. adapun dari anggaran di dinas kominfo Tahun 2017 sebesar Rp. 6.315.964.200,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.122.350.00,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.193.614.200,- dengan realisasidengan hasil capaian kinerja hasil evaluasi oleh inspektorat mendapatkan predikat atau nilai sebesar.....(yg dimasukkan hasil evaluasi 2016 dan untuk 2017 diberi ket belum dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat sehingga blm ada nilai)

- Program Peningkatan sarana dan prasarana terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu pemeliharaan peralatan dan jaringan dengan rincian anggaran Rp. 155.667.000,- Pemeliharaan peralatan dan jaringan disini berupa pemeliharaan tower di kampung Merasa kecamatan kelay. Adapun rinciannya sebagai berikut belanja pegawai sebesar Rp. 28.409.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 115.710.000,- realisasi keuangan mencapai Rp. 144.119.000,- sehingga jika di ukur dengan persentase capaiannya sebesar 92,58 %.
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pada program ini terdapat tiga (3) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar Rp. 245.000.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 5.976.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 972.000,- belanja modal sebesar Rp. 225.600.000,- sehingga total belanja sebesar Rp. 232.548.000,- jika digambarkan dalam persentase adalah sebesar 94,92 %.
 2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Internet
Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar Rp. 447.145.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 30.975.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 390.699.496,- sehingga total belanja pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 421.674.496,- dengan tingkat capaian sebesar 94,30 %.
 3. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 139.116.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 54.549.999,- dengan total belanja sebesar Rp. 193.665.999,- dengan tingkat pencapaian sebesar 92,22 %.
- Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam kegiatan ini terdapat anggaran sebesar Rp. 385.692.000,- dengan rincian sebagai berikut belanja pegawai sebesar Rp. 64.742.750,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 249.885.108,- belanja modal sebesar Rp. 47.900.180,- sehingga total belanja dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp. 362.528.038,- jika diukur dengan persentase sebesar 93,99 %.
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam program ini terdapat satu (1) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika dengan anggaran sebesar Rp. 109.076.000,- adapun rincian penggunaan anggaran ini adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.198.100,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 67.860.000,- belanja modal sebesar Rp. 25.080.000 sehingga total belanja dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp. 96.138.100,- jika diukur dengan persentase adalah sebesar 88,14 %

2.3 Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi
			2017	2021		2017
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet	60	97	Diskominfo	

2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mengusung satu Program Prioritas yang tergambar dalam RPJMD Kabupaten Berau yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa**. Untuk program tersebut di atas indikator Kinerjanya adalah Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi internet, berdasarkan data yang kami himpun dari 13 Kecamatan ada 114 desa/kelurahan/ Kampung, yang blank spot ada 25 kampung sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama Kampung	Keterangan
1	Batu Putih	1. Ampeng Medang	Blank Spot
		2. Balik Kukup	Blank Spot
		3. Batu Putih	Blank Spot
		4. Kayu Indah	Blank Spot
		5. Kobang Kelatak	Blank Spot
		6. Sumber Agung	Blank Spot
		7. Tembudan	Blank Spot
2	Biatan	1. Biatan BApinang	Blank Spot
		2. Biatan BAru	Blank Spot
		3. Biatan Ilir	Blank Spot
		4. Biatan Lempake	Blank Spot
		5. Biatan Ulu	Blank Spot
		6. Bukit Makmur Jaya	Blank Spot
		7. Karang	Blank Spot
		8. Manunggal Jaya	Blank Spot

3	Biduk-Biduk	1. Biduk-biduk	Blank Spot
		2. Giring-giring	Blank Spot
		3. Pantai Harapan	Blank Spot
		4. Tanjung Perepat	Blank Spot
		5. Teluk Sulaiman	Blank Spot
		6. Teluk Sumbang	Blank Spot
4	Tabalar	1. Buyung-Buyung	Blank Spot
		2. Semurut	Blank Spot
		3. Tabalar Ulu	Blank Spot
5	Maratua	1. Maratua (Payung-payung)	Blank Spot

Jadi jika di prosentasekan dari keseluruhan jumlah kampung yang ada kampung yang masih blank spot adalah = $25/114 \times 100\% = 21,93\%$.

Dalam program prioritas ini untuk tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp. 902.145.000 (Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), ada pun untuk realisasi anggaran untuk program diatas terserap sebesar Rp. 847.888.495. jika di ukur dengan nilai persentase adalah sebesar 93,99 %. Hal ini tergambar pada laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan pertanggal 31 Desember 2017. Didalam program ini terdapat tiga kegiatan :

1. *Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi*
2. *Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Internet*
3. *Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan bidang Persandian.*

Untuk tahun 2017 anggaran yang tersedia dalam program prioritas di akui belum memenuhi sasaran hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau masih fokus terhadap pemenuhan akan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan internet yang masih terfokus di sekitaran ibukota Kabupaten Tanjung Redeb dan pemenuhan terhadap kebutuhan OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Hal lain juga yang mempengaruhi terhadap target Program prioritas tersebut adalah masih sangat tergantungnya jaringan kita terhadap pihak lain dalam hal ini adalah PT. Telkom Indonesia dan Penyedia Provider jaringan telekomunikasi seperti PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. XL.Tbk.

2.5 Permasalahan dan Solusi

a. Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

➤ Permasalahan

Sejak keluarnya Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah hanya ada dua yaitu :Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain lingkup pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau untuk urusan komunikasi dan informasiterdapat (Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa) indikator kinerjanya adalah Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet dengan target kinerja untuk tahun 2017 adalah 60 Kampung, merujuk pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut maka otomatis kewenangan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur komunikasi dan informasi sampai kekampung-kampung bukan kewenangan pemerintah daerah lagi. Hal ini menjadi hambatan dalam mengentaskan program prioritas kepala daerah yang tergambar dalam RPJMD.

Demikian juga dengan letak geografis Kabupaten Berau yang sangat luas terdiri dari 13 kecamatan, 100 Kampung dan 10 Kelurahan sehingga jangkauan internet yang sampai kekampung-kampung belum maksimal sehingga banyak terdapat daerah-daerah yang blankspot. Demikian juga dengan anggaran yang masih sangat minim dalam menunjang Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada program Peningkatan sarana dan Prasarana terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan, permasalahan yang dihadapi dari kegiatan ini adalah jarak tempuh objek yang cukup jauh dari ibukota kabupaten yang terkait dengan pemeliharaan peralatan dan jaringan yang berada dikampung merasa kecamatan Kelay. Dalam kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran operasional tower di kampung Marasa harus menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset yang menunjang beroperasinya setiap hari. Mobiltas bahan Bakar Minyak inilah yang di anggap agak sulit karena jumlah liter bahan bakar minyak yang di pesan dari stasiun pengisian bahan bakar harus memenuhi jumlah tertentu baru bias di antarkan.

➤ **Solusi**

Beberapa solusi yang coba di tempuh untuk memenuhi permasalahan yang timbul dari kegiatan tersebut adalah dengan menghimbau agar kiranya pihak swasta yang beroperasi disekitar kampung merasa agar kiranya dapat ambil andil dalam memenuhi permasalahan yang dihadapi.

b. Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

➤ **Permasalahan**

Program Prioritas yang berdasarkan RPJMD kabupaten Berau yang berkaitan dengan Komunikasi dan nformasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa. Permasalahan yang timbul dari program ini adalah masih terdapatnya beberapa jumlah kampung yang belum terkoneksi jaringan telekomunikasi. Sementara saat ini system pelaporan keuangan dana Desa sudah menerapkan pelaporan menggunakan system yang harus didukung media telekomunikasi berupa jaringan internet.

➤ **Solusi**

Untuk solusinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau telah berusaha membuatkan usulan baik itu ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun Pmemerintah Pusat untuk dapat kiranya di beberapa daerah yang blank spot dapat di tabah pembangunan Tower dan hal ini mendapat respon yang positif dari pemerintah Provinsi ataupun pemerintah Pusat dengan akan dibangunnya 11 Tower mini (sebagai penguat sinyal di daerah-daerah yang telah ditentukan titik koordinatnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Berau untuk tahun 2017 belum ada melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat baik itu dari kementian maupun dari lembaga lainnya sehingga tidak tergambar dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Antar Daerah (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan *nomor surat Nomor :59.2/22-PRJJ/BKPWPDT/2017*

Nomor :52/NK/BPPT-PEMKAB.Berau/08/2017.

Kebijakan ini diambil karena dianggap BPPT pusat adalah lembaga yang selama ini telah melakukan riset dan penelitian dibidang teknologi yang sangat membantu pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang di anggap strategis untuk dapat memenuhi tarap hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPT pusat ini adalah ditelitinya air asin yang ada di kepulauan maratua yang kedepannya 17amp di suling menjadi air tawar, mengingat di kepulauan maratua kebutuhan air tawar sangat mendesak bagi kehidupan masyarakat di kepulauan tersebut.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Terkait dengan relisasi pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2017 belum ada realisasi dari kegiatan MoU tersebut, hal ini terbentur dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Harapan kedepannya dengan adanya MoU tersebut agar kiranya Pemerintah Kabupaten dalam hal ini OPD yang ingin melaksanakan kerjasama dengan pihak BPPT dapat melakukan kerjasama dengan bernaung pada Mou yang telah di sepakati antara Pemerintah Kabupaten Berau denagn BPPT.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul adalah turunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Berau pada Tahun 2017 dari tahun-tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap 18amper kesemua lini program dan kegiatan yang ada di OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau tidak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika. Demikian juga dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas untuk melkukan riset dan penelitian.

Adapun solusi yang di anggap dapat menutupi permasalahan di atas agar kiranya untuk kedepannya pihak BPPT pusat dapat menganggarkan setiap program dan kegiatan yang mereka usung yang sumber dananya sebaiknya dari APBN, mengingat jumlah dana untuk melakukan Penelitian dan Riset tidaklah sedikit dan ruang lingkup kerja BPPT ini sangat lah luas.

4.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan pihak Ketiga) yang berlaku sampai dengan Tahun 2017 :

Untuk tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau belum ada melaksanakan kerjasama yang dimaksud tersebut.

4.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 belum ada melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal, hal ini berkaitan karna Dikominfo Kabupaten Berau baru terbentuk apada tahun 2017.

BAB V

PENGHARGAAN

Penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional serta Lembaga Lain.

Mengingat tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau baru terbentuk sehingga belum ada penghargaan baik itu tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

NIHIL

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dijelaskan beberapa hal dari beberapa BAB diatas maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika baru Terbentuk di tahun 2017 maka untuk data-data yang diminta oleh TIM penyusunan LKPJ Kabupaten Berau belum dapat kami penuhi seluruhnya hal ini terkait dengan data 2016 untuk urusan Komunikasi dan Informatika masih tergambar dan melekat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk data DPA 2016 belum dapat di sajikan karena program dan kegiatan di tahun 2016 masih terbagi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi yang melekat pada Sekretariat Daerah Kab. Berau.
3. Pada BAB III terdapat urusan tugas pembantuan, hal ini juga belum terlaksana karena pada tahun 2016/2017 belum ada urusan tugas pembantuan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

5.2. Saran

Sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 ada beberapa saran yang dapat kami himpun sesuai dengan kondisi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a) Untuk menunjang Urusan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar kiranya anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditingkatkan mengingat urusan dan tugas fungsi OPD ini cukup luas yang terdiri dari tiga urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

b) Mengingat LKPJ OPD adalah sumber data untuk menyusun LKPJ Kabupaten Berau agar Kiranya Tim penyusun LKPJ Kabupaten dapat memberi ruang waktu yang cukup mengingat di awal tahun hampir seluruh laporan dikerjakan hampir bersamaan sehingga dengan waktu yang cukup kami dari OPD dapat menyiapkan data yang lebih akurat dan teliti.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



Drs. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19620526198803 1 006

